



BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

1. Pendidikan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambar dari tingkat pendidikannya. Melalui pendidikan, masyarakat dapat dibina menjadi tenaga terampil, handal dan produktif sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahtraannya. Keberhasilan untuk membentuk sumber daya manusia yang terampil dan produktif juga ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan.

Upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan adalah mensukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Seiring dengan penambahan penduduk, maka jumlah anak usia sekolah juga mengalami peningkatan. Pertambahan tersebut ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang memadai. Keterbatasan tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi proses pendidikan yang sedang dijalankan serta kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan pada masa yang akan datang.

Sebagai kota jasa, industri dan perdagangan, Kota Balikpapan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai.

Namun hal tersebut belum bisa terpenuhi karena sebagaimana tenaga kerjanya belum memiliki tingkat pendidikan yang memadai atau keahliannya tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Kesempatan kerja yang ada sebagian besar diisi oleh tenaga kerja luar Kota Balikpapan yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan terjadi ledakan penduduk.

Oleh karena itu, pemerintah Kota Balikpapan perlu mengembangkan pendidikan unggulan dan kejuruan baik secara formal, non formal maupun informal. Dengan keterampilan dan tingkat pendidikan yang memadai, masyarakat Kota Balikpapan dapat memiliki daya saing untuk memasuki pasar kerja. Hal ini penting artinya untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang siap pakai, baik untuk pasar tenaga kerja lokal, regional maupun internasional.

2. Kesehatan

Salah satu indikator kualitas kehidupan masyarakat dapat dilihat dari tingkatan derajat kesehatannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan drajat kesehatan secara terus menerus dan memberikan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Selama ini, pemerintah telah berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pembangunan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat serta pemberian pelayanan kesehatan secara gratis. Pelayanan kesehatan gratis diberikan pemerintah Kota Balikpapan melalui program jaminan kesehatan bagi masyarakat dengan menggunakan dana APBD.

Masih banyak ditemukan beberapa jenis penyakit yang diderita warga masyarakat Kota Balikpapan, diantaranya disentri, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan gangguan saluran pernafasan Hal ini merupakan indikasi dari masih kurangnya ketersediaan sanitasi yang baik, serta kebersihan lingkungan dan polusi udara.

Salah satu upaya mendasar yang perlu dilakukan adalah memasyarakatkan dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3. Kependudukan

Berdasarkan data demografi yang disajikan pada bagian terdahulu, diketahui bahwa penambahan penduduk Kota Balikpapan pertahun cukup tinggi, yakni rata-rata mencapai 4,13 % per tahun. Pertambahan penduduk tersebut umumnya didominasi oleh penduduk pendatang (migrasi). Hal ini erat kaitannya dengan kondisi Kota Balikpapan sebagai kota jasa, industri

dan perdagangan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk bermigrasi ke Kota Balikpapan.

Seperti daerah lainnya, penyebaran penduduk Kota Balikpapan juga tidak merata. Kepadatan penduduk yang tinggi berada di daerah pusat kota, khususnya Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Selatan. Hal ini mengakibatkan munculnya pemukiman – pemukiman kumuh dengan permasalahan sosial yang cukup tinggi.

Sebagai daerah terbuka, mobilitas penduduk untuk keluar dan masuk Kota Balikpapan cukup tinggi. Penduduk yang datang dan menetap di Kota Balikpapan sebagian tidak melaporkan diri ke pemerintah setempat. Kondisi ini menyebabkan administrasi kependudukan kurang akurat. Hal tersebut dapat diindikasikan pada perbedaan jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh beberapa instansi resmi sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan pada masa sekarang dan akan datang.

4. Ketenagakerjaan

Keberadaan berbagai macam perusahaan baik yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan jasa di Kota Balikpapan memberikan peluang lapangan pekerjaan yang cukup besar. Kondisi ini mendapat perhatian dari pencari kerja diseluruh Indonesia sehingga berdatangan ke Kota Balikpapan untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian, walaupun terjadi peningkatan kesempatan kerja namun disisi lain terjadi pula lonjakan peningkatan pencari kerja, dimana peningkatan kesempatan kerja selalu lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Pada masa yang akan datang kebutuhan tenaga kerja di Kota Balikpapan masih cukup besar mengingat Kota Balikpapan merupakan

kota industri, perdagangan dan jasa yang terus berkembang. Sektor perindustrian Kota Balikpapan diprediksi tumbuh positif yang dibarengi dengan kebutuhan tenaga kerja yang profesional. Perkembangan industri tersebut dapat terlihat dari komitmen Pemerintah Kota untuk mengembangkan Kawasan Industri Kariangau.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan stakeholder lainnya untuk memperbaiki mutu dan kualitas tenaga kerja Kota Balikpapan melalui pelatihan dan praktek kerja agar menjadi tenaga yang siap pakai. Rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja akan mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan mengingat pada era globalisasi ini terjadi persaingan tenaga kerja disegala bidang baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Selama ini, kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja kurang diperhatikan secara serius oleh pengusaha. Hal ini menyebabkan sering terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian diperlukan upaya – upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar merasa aman dalam bekerja.

5. Pemuda dan Olahraga

Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, Kota Balikpapan dapat dikatakan sebagai daerah dalam transisi komposisi penduduk dari kategori penduduk usia muda ke arah penduduk usia tua. Komposisi ini mencirikan bahwa penduduk Kota Balikpapan berada pada kelompok peralihan (intermediate). Hal tersebut dapat terjadi karena Kota Balikpapan sebagai

daerah terbuka dimana mobilitas (migrasi) penduduk usia produktif sangat tinggi.

Sampai saat ini, peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan umumnya masih rendah. Kegiatan dan organisasi kepemudaan belum mampu menunjukkan fungsi dan peran lembaga kepemudaan dalam proses pembangunan. Mengingat peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan pada masa yang akan datang diprediksi akan meningkat maka diperlukan upaya-upaya untuk mendorong kepedulian terhadap berbagai permasalahan pembangunan.

Secara umum, prestasi olahraga masyarakat Balikpapan cukup baik. Hal ini disebabkan pembinaan yang intensif terhadap cabang-cabang olahraga serta masyarakat yang serius untuk menekuni dunia olahraga. Tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan olahraga perlu didukung oleh sarana dan prasarana olahraga yang tersedia. Masih minimnya sarana dan prasarana olah raga menyebabkan atlit-atlit muda berbakat tidak memiliki tempat latihan yang memadai dan latihan-latihan yang dilakukan menjadi kurang intensif. Dengan demikian, atlit-atlit yang ada belum maksimal menunjukkan prestasinya baik di tingkat provinsi ataupun nasional.

6. Kesejahteraan Sosial

Penduduk miskin Kota Balikpapan sebagian besar merupakan pendatang baru tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang memadai. Kaum pendatang baru tersebut berada di Balikpapan tanpa pekerjaan yang jelas sehingga menambah penduduk miskin.

Kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat dan penduduk lanjut usia akan dididik dan diberi ketrampilan agar dapat berkembang dan diterima dilingkungannya. Kesejahteraan sosial para lanjut usia dan sumber daya manusia pengelola kesejahteraan sosial belum maksimal diperhatikan.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pemerintahan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengarah pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Secara birokratis kebijakan tersebut diinstruksikan hingga tingkat kelurahan.

Sampai saat ini, pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya serta sarana dan prasarana di kelurahan belum ditingkatkan dan diupayakan secara optimal. Sasaran utama pembangunan tersebut adalah agar kondisi masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan dapat mengakses berbagai kebutuhan baik itu berupa kebutuhan informasi, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang layak, listrik, pekerjaan yang layak, pelayanan prima dari pihak pemerintah dan kebutuhan lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat, sehingga secara bertahap ekonomi masyarakat miskin akan meningkat.

Berdasarkan fakta yang ada masyarakat Kota Balikpapan masih hidup dalam kondisi yang kurang mandiri dalam arti memiliki sifat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya pemberdayaan masyarakat di

masa mendatang diharapkan akan mampu memberikan keseimbangan antara upaya penguatan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dengan kebijakan pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam proses pembangunan, dengan penekanan pada aspek lingkungan serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagai jajaran pemerintahan terdepan dalam pemberdayaan masyarakat.

8. Reformasi Birokrasi

Pemberian kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan semua bidang pemerintahan yang terdiri dari 11 kewenangan diluar kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal. Disamping itu, pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Pemerintah Kota Balikpapan berupaya keras untuk menata kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Penataan struktur kelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan diharapkan dapat berfungsi secara optimal dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yang dirinci dalam bentuk program dan kegiatan agar dapat disesuaikan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk instansi-

instansi pemerintahan. Penataan kelembagaan tersebut diimplikasi juga terhadap penempatan sumber daya manusia berdasarkan kapasitasnya dimasing-masing instansi. Penempatan SDM berdasarkan kapasitasnya diupayakan melalui mutasi pegawai baik tingkat pejabat maupun staf dengan harapan untuk memperoleh kinerja pegawai yang maksimal.

Sebagai salah satu daerah otonom, pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan cepat bagi masyarakatnya. Hal tersebut tentunya dapat dicapai jika sumber daya manusia yang cakap, tangguh dan professional serta didukung ketersediaan teknologi informasi yang memadai.

Walaupun pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan efisiensi organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan dan potensi wilayahnya agar koordinasi antar instansi mudah dibangun dengan cepat. Namun masyarakat tetap saja menganggap bahwa proses birokrasi dalam pemerintahan cukup panjang dan mahal sehingga mengharapkan pelayanan pemerintah yang cepat dan murah.

Sebagai daerah terbuka dengan mobilitas penduduk yang tinggi, Kota Balikpapan juga tidak lepas dari berbagai permasalahan daerah. Untuk mengatasi berbagai permasalahan, berbagai stakeholder belum terkoordinir dengan baik sehingga terkesan lamban dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul belum mampu diatasi secara maksimal.

9. Penegakan Hukum

Pembangunan di bidang hukum sudah dilakukan oleh pemerintah tetapi belum dapat menjangkau semua program yang direncanakan. Pengembangan Budaya Hukum yang menjadi program prioritas di masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan ketaatan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat di bidang hukum masih rendah.

Produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dijadikan sebagai landasan hukum bagi pemerintah kota untuk menangani masalah-masalah baik yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan maupun yang berhubungan dengan warga masyarakat belum dijalankan dengan baik. Perda belum dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah kota secara maksimal dalam menata aktivitas masyarakat, sehingga timbul kekhawatiran bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersifat universal seperti pelanggaran HAM.

10. Komunikasi dan Informasi

Teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu sektor yang penting dalam kegiatan pembangunan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, akan membuka akses masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar dan menjadi sarana penyebaran informasi pembangunan. Hal ini menyebabkan masyarakat dapat berkembang dengan cepat dan berbudaya informasi

Peran media massa di Kota Balikpapan masih belum optimal dalam memberikan informasi yang akurat, lengkap, jujur, adil dan berimbang kepada masyarakat. Saat ini, jaringan televisi dengan muatan lokal yang terbatas. Media cetak dalam bentuk tabloid dan majalah terbit secara berkala, yakni setiap satu minggu, dua minggu, dan tabloid bulanan. Meskipun tren penggunaannya mengalami peningkatan, namun jangkauan layanan maupun mutu penerbitan belum sesuai harapan.

11. Penataan Ruang

Penataan ruang Kota Balikpapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang dimulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dijabarkan lagi dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan lebih detail lagi Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus dan Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 5 Tahun 2006 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2005 – 2015. Sesuai dengan Undang – Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Sejak Tahun 2010 Pemeruintah Kota Balikpapan mulai merevisi RTRW tersebut dan telah ditetapkan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012 – 2032. Sebagai acuan operasional perizinan, RTRW Tersebut akan

ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan dan peraturan zonasi.

Permasalahan didalam melaksanakan penataan ruang di Kota Balikpapan adalah pesatnya pertumbuhan pembangunan pada pusat kota dan sekitarnya, sehingga terjadi perubahan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Oleh karena itu perlu pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota dan kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang yang berlaku masih perlu ditingkatkan lagi. Sebagai akibat dari itu semua dampaknya yang bisa dirasakan adalah terjadinya banjir, tanah longsor, kepadatan lalu lintas dan sebagainya, yang seharusnya hal tersebut dapat dieliminir melalui mekanisme perizinan.

12. Perumahan dan Pemukiman

Perkembangan pemukiman di beberapa kawasan yang tidak disertai pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan telah menimbulkan pemukiman kumuh serta memunculkan permasalahan sosial perkotaan. Hal ini menyebabkan kualitas lingkungan menurun serta menjadikan kawasan perumahan menjadi tidak berwawasan lingkungan.

Pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, pemerataan kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh merupakan harapan pemerintah dan masyarakat. Adanya harapan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi perumahan dan pemukiman di Kota Balikpapan pada masa yang akan datang diyakini akan semakin membaik walaupun penyediaannya masih akan terpusat di daerah perkotaan. Upaya

pengembangan perumahan dan pemukiman ke daerah pengembangan yaitu dengan membangun perumahan Korpri yang diperuntukan bagi Pegawai Negri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan memang telah diupayakan pemerintah, tetapi masih terkendala pada terbatasnya ketersediaan sumber energi listrik dan penyediaan air bersih.

Sebagian besar kawasan pemukiman kumuh berada dekat sungai dan pesisir. Tingginya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal mengakibatkan tak terkendalinya konversi lahan yang mengakibatkan munculnya potensi lingkungan kumuh dan masih tingginya angka backlog serta masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Penataan dan relokasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan pembangunan Rusunawa yang tersebar di Kota Balikpapan. Hingga Tahun 2012 telah terbangun 1 Unit Rusunawa kawasan DPU yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Balikpapan, dan 3 Unit Rusunawa yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat terdiri dari Rusunawa Manggar, Rusunawa Sepinggian, dan Rusunawa KM 7 Batu Ampar. Pembangunan rusunawa terus ditingkatkan guna Memenuhi Program penataan permukiman.

13. Perhubungan

Sebagai kota yang secara fisik berbatasan dengan laut, maka Kota Balikpapan memiliki beberapa fasilitas pelabuhan baik pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus. Pelabuhan umum terdiri dari Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Ferry Kariangau, Pelabuhan Kampung Baru. Sedangkan pelabuhan khusus terdiri dari Pelabuhan Pertamina, Pelabuhan

Pendaratan Ikan Manggar, dan Pelabuhan yang dimiliki oleh perusahaan di Kawasan Industri Kariangau. Keberadaan Pelabuhan Semayang yang berada di pusat kota saat ini menimbulkan bangkitan lalu lintas yang cukup tinggi terlebih lagi adanya peningkatan bongkar muat barang dan penumpang. Oleh karena itu, di masa yang akan datang pelabuhan ini hanya akan dioperasikan untuk pelabuhan penumpang. Sedangkan pelabuhan peti Kemas dikembangkan di Kariangau.

Sedangkan untuk transportasi udara dilayani melalui Bandar Udara Internasional Sepinggán yang saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Namun kapasitas bandaranya relatif terbatas dalam menampung penumpang. Oleh karena itu pengembangan bandara baik dari segi run way maupun terminal akan mampu meningkatkan pelayanan Bandara Udara Sepinggán.

Dalam hal urusan transportasi darat, Pemerintah Kota Balikpapan telah banyak melakukan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan darat kepada masyarakat. Sistem transportasi yang handal, berkapasitas massal, efisien dan menjawab kebutuhan terus dikembangkan. sehingga mampu menggerakkan dinamika pembangunan dan mendukung mobilitas manusia dan barang dari dan ke luar Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan sudah memiliki Perencanaan Transportasi tentang Pola Transportasi Makro yang meliputi :

- a. Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum Massal, Kebijakan ini meliputi perencanaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM), Perencanaan Angkutan Umum Massal Moderen yang terdiri dari: Monorel dan Trem.

b. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

Kebijakan ini meliputi pengembangan dan peningkatan kapasitas ruas jalan, peningkatan kapasitas simpang (dengan pembangunan fly over dan underpass), serta pengembangan Automatic Traffic Control System (ATCS).

c. Pengembangan Kebijakan Pendukung

14. Prasarana Jalan

Sarana jalan raya adalah bagian dari sistem perhubungan utama di Kota Balikpapan. Selain itu ada sarana perhubungan pelabuhan Semayang dan perhubungan udara Internasional Sepinggian. Sebagai sarana utama jalan raya di Kota Balikpapan, panjang jalan di Kota Balikpapan pada tahun 2010 adalah sepanjang 799,52 km dengan rincian sesuai status jalan sebagai berikut :

- Jalan Nasional : 115,0 Km
- Jalan Propinsi : 221,07 Km
- Jalan Kota : 463,35 Km

Adapun kondisi fisik jalan tersebut sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat bahwa untuk jalan Nasional dalam kondisi baik sepanjang 97,65 km atau 84,91%, kondisi sedang sepanjang 15,33 Km atau 13,33% dan kondisi rusak 2 km. Untuk jalan Propinsi dalam kondisi baik sepanjang 146,43 km atau 66,23%, kondisi sedang sepanjang 51,43 Km atau 23,23% dan kondisi rusak 23,3 Km atau 10,49%. Sedangkan untuk jalan kota dalam kondisi baik sepanjang 305,42 km atau 65,91%, kondisi sedang sepanjang 96,99 Km atau 20,93% dan kondisi rusak 60,94 Km atau 13,15%.

15. Lingkungan Hidup

Kota Balikpapan memiliki dua hutan lindung yaitu hutan lindung sungai wain memiliki luas 17766.53 ha dan hutan lindung sungai manggar dengan luas 1243.35 Ha. dua hutan lindung ini berfungsi untuk menjaga ketersediaan sumber air baku dan menjaga kualitas udara Indonesia khususnya Kota Balikpapan, melihat fungsi hutan lindung tersebut maka Pemerintah Kota Balikpapan membentuk Badan Pengelolaan Hutan Lindung (BPHLSW) dibawah Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Tahun 2012 direncanakan pembangunan freeway yang melewati sebagian hutan lindung Kota Balikpapan. Selain hutan lindung, Pemerintah Kota Balikpapan memiliki hutan mangrove yang tersebar dibagian barat khususnya di Kelurahan Margasari, Kelurahan Kariangau. Luas seluruh Hutan mangrove yang dimiliki oleh kota Balikpapan adalah 1859.51 Ha. Saat ini hutan mangrove di Kelurahan Graha Indah yang merupakan pemekaran dari kelurahan Batu Ampar dikelola oleh masyarakat tepatnya masyarakat perumahan Graha Indah untuk ekowisata. Untuk hutan mangrove di Kelurahan Margomlyo telah dimanfaatkan sebagai ekowisata dan tempat pembelajaran siswa tentang ekosistem mangrove, oleh karena itu Pemerintah Kota Balikpapan telah mendirikan SMA 8 yang berdampingan dengan hutan mangrove.

Pemerintah Kota Balikpapan terus menjaga Konsistensi Rasio Pola Ruang Kawasan Lindung 52% : Kawasan budidaya 48% sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Balikpapan dalam melestarikan lingkungan hidup bentuk lainnya adalah:

- a. Konsistensi Tidak Membuka wilayah pertambangan
- b. Pengembangan Konsep *Ecological City*:

- i. *Foresting The City* (Penhijauan kawasan perkotaan dengan tanaman keras/hutan dari Hutan Lindung Sungai Wain),
- ii. *Green Coridor* (Penhijauan pada koridor jalan),
- iii. *Green Industry* pada Kawasan Industri Kariangau (KIK) didukung konsep *zero waste* dan *zero sediment*.

Pelaksanaan Penyehatan lingkungan di masyarakat melalui Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Kota Balikpapan yang didalamnya terdiri dari masyarakat dan Stakeholder terkait yang turut berperan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi melalui sub sektor didalamnya antara lain: air minum, air limbah, persampahan, dan drainase

16. Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kota Balikpapan dilaksanakan oleh PDAM Kota Balikpapan yang pada tahun 2005 telah dapat melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat sebanyak 60.613 pelanggan atau 65% dari masyarakat Balikpapan yang perlu mendapatkan pelayanan air bersih .

PDAM Balikpapan saat ini melayani sekitar 73% penduduk Kota Balikpapan dengan 80.600 SR, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan saat ini dioperasikan 6 IPA yang bersumber dari air permukaan dan air tanah. Sumber air baku utama berasal dari Waduk manggar yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara yang mampu menyediakan air baku sebesar 900 liter/detik dan dapat bertahan selama 6 bulan tanpa hujan karena memiliki kapasitas tampungan sebesar 16 juta m³ air baku waduk manggar ini dipergunakan sebagai air baku IPA Batu Ampar dan IPA

Kampung Damai, Sumber air baku lainnya beraal dari air tanah (sumur bor) dan sungai.

Kapasitas Produksi terpasang dari seluruh IPA sebesar 1.115 liter/detik seluruh IPA menggunakan sistem pengelolaan lengkap dikarenakan mutu air baku saat ini, beberapa IPA menggunakan air baku dari gabungan air permukaan dan air tanah yang dimanfaatkan oleh IPA Batu Ampar dan IPA Kampung Damai.

Ketersediaan air baku kota Balikpapan saat ini hanya 1.104 liter/detik sedangkan kebutuhan air baku mencapai 1.206 liter/detik sehingga terjadi defisit air baku sebesar 102 liter/detik, Target Kota Balikpapan sampai tahun 2016 adalah tersedianya air baku mencapai 1.400 lt/detik sehingga diperlukan perencanaan sumber air baku lain antara lain : Rencana pembangunan Waduk Teritip dan Wain yang sampai tahun 2012 masih terkendala dengan pembebasan lahan yang berdampak pada lambatnya proses sertifikasi bendungan sehingga menghambat pekerjaan fisik pembangunan bendungan itu sendiri. Penggunaan air bawah tanah harus sudah mulai dibatasi mengingat kondisi hidrologi Kota Balikpapan yang tidak menguntungkan.

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya yang juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah dengan penggantian pipa transmisi dan pipa distribusi, mengingat pipa tersebut telah dibangun pada tahun 1980 an secara teknis sudah tidak dapat berfungsi secara optimal, sehingga perlu dilakukan penggantian.

17. Perekonomian Kota Balikpapan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan dijelaskan bahwa Kota Balikpapan saat ini memiliki potensi sektor unggulan dari sektor jasa, industri dan perdagangan. Sektor jasa, industri dan perdagangan merupakan sektor unggulan dan menjadi basis ekonomi Kota Balikpapan. Berbeda dengan Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, kontribusi struktur perekonomian Kota Balikpapan sektor tersier tanpa migas memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi kota Balikpapan dimana tahun 2005 sektor tersier yang meliputi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 73,05 itu menggambarkan kota Balikpapan merupakan kota modern.

Sektor non migas di Kota Balikpapan pada tahun 2005 menyumbang 47,22% terhadap perekonomian kota. Pada tahun 2011 kontribusi sektor non migas meningkat menjadi 49,48%. Sektor non migas yang memberikan kontribusi besar adalah sektor Perdagangan, Hotel, Restoran yang saat ini kontribusinya mencapai 16,33 % terhadap sektor PDRB non migas (data tahun 2011). Kontribusi sektor lain yakni sektor perdagangan, keuangan dan jasa tidak menunjukkan perubahan kontribusi yang signifikan dan kontribusinya cenderung stagnan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan selama periode 2005-2011 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,12 persen. Jika sektor migas tidak diperhitungkan, Pendapatan per kapita tahun 2011 mencapai Rp. 32.366.142 atau setara 31.796 US \$ (dengan nilai tukar 1 US \$ = Rp.

10.000). Dan jika sektor migas dalam PDRB diperhitungkan, pendapatan per kapita Kota Balikpapan tahun 2011 sudah mencapai Rp 53.093.814 atau sekitar US \$ 53.094. Perbedaan yang besar antara PDRB perkapita dengan tanpa migas tersebut menunjukkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat kota Balikpapan masih dipengaruhi oleh sektor migas.

Perkiraan Kondisi Perekonomian Kota Balikpapan Masa Depan

Salah satu permasalahan penting dalam perumusan visi dan misi Kota Balikpapan adalah bagaimana kondisi perekonomian Kota Balikpapan di masa depan yang mungkin terjadi dan bagaimana pula kondisi ekonomi yang diinginkan oleh stakeholder Kota Balikpapan. Jika ada gap antara yang mungkin terjadi dengan keinginan pemangku kepentingan tersebut, maka visi dan misi serta arah strategi digunakan agar yang diharapkan benar-benar terjadi sehingga keinginan dan kemungkinan kondisi perekonomian tidak terjadi gap. Oleh karena itulah dalam menganalisis kondisi perekonomian Kota Balikpapan di masa depan, maka ini akan mengembangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi di masa depan.

Dalam kerangka jangka panjang, skenario perekonomian Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. **Skenario Base Line** : Skenario ini merupakan skenario jika perekonomian Kota Balikpapan akan mengikuti tren dalam lima tahun terakhir yakni sektor primer (Pertanian, Pertambangan&Penggalian) mengalami pertumbuhan berfluktuatif dan memberi kontribusi yang rendah dan cenderung mengalami penurunan dan sektor lain tumbuh sebagaimana pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir, dimana kontribusi industri pengolahan minyak masih memberi kontribusi yang

besar sedangkan industry non migas cenderung mengalami perlambatan Skenario ini merupakan skenario yang cenderung pesimis.

2. **Skenario Moderat** : Skenario ini dirancang dengan mengasumsikan bahwa sektor migas tetap tumbuh dan member kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian dengan migas dimana kota Balikpapan hanya sebagai tempat industry pengilangan minyak
3. **Skenario Optimis** : scenario tanpa migas dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi ditambah pertumbuhan yang lebih tinggi di sektor tersier meliputi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengakutan dan Komunikasi Sektor keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-jasa serta pertumbuhan sektor sekunder industri pengolahan (industri non migas) dan sektor tanpa migas mengalami peningkatan dan akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan.

Jika perekonomian Kota Balikpapan tumbuh mengikuti tren lima tahun terakhir yakni perekonomian tanpa migas akan mengalami peningkatan diatas migas pada tahun 2025 sektor non migas mampu mensubtitusi sektor migas. Skenario ini terjadi jika seluruh stakeholder merespons atas perkembangan sektor non migas dan berusaha usaha untuk mendorong perkembangan sektor non migas. Skenario akan segera terwujud, karena perumusan visi dan misi yang dilakukan dalam penyusunan RPJP Kota Balikpapan merupakan respon atas kondisi yang ada saat ini. Oleh karena itu, skenario yang berpeluang untuk terjadi adalah skenario Optimis .

Jika perekonomian dilihat tanpa migas seperti tren yang terjadi dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang tinggi merupakan gambaran riil, tetapi melalui serangkaian kebijakan pemerintah Kota Balikpapan berhasil mendorong sektor industri, Perdagangan dan jasa 31,81 persen, yang kemudian diikuti oleh bergeraknya sektor jasa, maka perekonomian Kota Balikpapan masih terus akan berkontraksi sampai tahun 2020 dan kemudian perekonomian Kota Balikpapan tanpa migas tumbuh diatas non migas hingga tahun 2025 dan setelah itu perekonomian sektor non migas akan tumbuh dan member kontribusi terhadap perekonomian kota Balikpapan. Dengan kinerja ekonomi demikian, pada tahun 2025 sektor non migas mampu mensubstitusi sektor migas. Tampaknya proyeksi pertumbuhan dan struktur perekonomian dengan skenario optimis tersebut cukup memberikan gambaran basis perekonomian kota Balikpapan sesungguhnya, maka periode RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025, kondisi perekonomian Kota Balikpapan akan tetap tumbuh. Periode ini harus digunakan untuk meletakkan dan memperkuat dasar dalam rangka melakukan mempercepat transformasi ekonomi Kota Balikpapan. Jika percepatan pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi yang diharapkan, maka hasil proyeksi skenario yang optimis.

Jika menginginkan Kota Balikpapan tumbuh relatif lebih cepat maka arah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah adalah tetap mempertahankan sektor perdagangan, jasa dan industri Non Migas dengan kapasitas yang ada saat ini (walaupun dengan pertumbuhan nol) dan diikuti oleh kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor agroindustri, perikanan kelautan jasa maritime, perdagangan dan jasa yang tumbuh relative tinggi, maka mulai tahun 2011 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tanpa migas yang cenderung tinggi

dengan kinerja ekonomi demikian, transformasi ekonomi Kota Balikpapan dilakukan dengan mempercepat pembangunan disektor non migas karena sektor non migas baru akan mensubstitusi sektor migas pada tahun 2020. Jika hasil skenario optimis ini menunjukkan bahwa periode RPJPD Kota Balikpapan digunakan untuk meletakkan dan mempercepat dasar transformasi ekonomi Kota Balikpapan, serta dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan migas yang secara makro memberikan kontribusi terhadap perekonomian kota Balikpapan Kondisi ini akan bisa dicapai jika sektor industri migas, khususnya minyak, masih akan exist dengan kapasitas yang sama saat ini yang diikuti kebijakan mendorong pertumbuhan sektor non migas ke level pertumbuhan yang relatif tinggi. Usaha yang perlu dilakukan agar sektor industri pengolahan minyak masih bisa beroperasi dengan kapasitas seperti saat ini, serta kebijakan dan langkah-langkah strategis apa yang perlu diambil agar sektor non migas bisa tumbuh dengan tingkat yang relatif tinggi. Ini merupakan salah satu permasalahan penting bagi pemerintah Kota Balikpapan agar kondisi perekonomian dengan skenario optimis ini bisa diwujudkan. Dengan skenario ini, memang transformasi ekonomi akan terjadi setelah periode RPJPD 2005-2025 selesai,

Dari hasil simulasi, maka beberapa kesimpulan terkait dengan perkiraan masa depan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025 seyogyanya diarahkan untuk mentransformasi ekonomi Kota Balikpapan dengan mendorong pertumbuhan sektor non migas utamanya perdagangan. jasa agar struktur perekonomian Kota Balikpapan menjadi lebih kuat. Hasil proyeksi perekonomian dengan baseline (industri migas terus menurun dan sektor lain (non migas) berkembang) menunjukkan bahwa

hingga tahun 2025-an perekonomian Kota Balikpapan akan terus berada dalam peningkatan Hal ini disebabkan besarnya pendapatan dari sektor industri migas (industry penggilangan minyak) dalam perekonomian Kota Balikpapan (saat ini mencapai kurang lebih 50,52 % dari PDRB Kota Balikpapan, sehingga meningkatkan pendapatan dari sektor industri non migas yang akan membuat struktur perekonomian menjadi lebih kokoh.

- 2) Setidaknya ada ruang pilihan untuk melakukan transformasi ekonomi agar struktur ekonomi menjadi lebih kokoh yaitu :
 - a. Pilihan pertama adalah karena karakter sumber daya yang tak terbarukan, sektor industri migas di masa depan akan terus mengalami penurunan., karena sektor non migas akan berkembang lebih baik dan di masa depan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan.
 - b. Pilihan kedua adalah tetap mengupayakan agar industri migas di Kota Balikpapan tetap exist dengan kapasitas yang ada saat ini dan mendorong pertumbuhan di sektor non migas..tetapi setidaknya jika benar-benar minyak habis kegiatan sebagian jasa service perminyakan akan hilang dan akan mengurangi nilai penggerak ekonomi baikpapan, balance untuk itu adalah adanya industry petrokimian yang menghasilkan produk hiir perminyakan.

Dari fakta-fakta yang diungkapkan mengenai struktur perekonomian Kota Balikpapan seperti yang telah diuraikan di atas, yakni menurunnya kontribusi sektor industri migas dalam perekonomian menunjukkan bahwa saat ini terjadi transformasi perekonomian Kota Balikpapan dari sektor primer (sumber daya alam) dan sekunder (industri berbasis sumber daya alam) ke sektor sekunder-

tersier (industry pengolahan non migas, perdagangan dan jasa). Hal ini merupakan indikasi adanya perubahan yang harus dicermati oleh pemerintah Kota Balikpapan agar pembangunan Kota Balikpapan tetap sustainable.

Dengan memperhatikan potensi Kota Balikpapan serta dukungan diwilayah sekitarnya, maka sektor non migas yang mempunyai potensi unggulan untuk dikembangkan di Kota Balikpapan adalah industri pengolahan perkebunan dan hasil laut, perdagangan dan jasa maritim.

Oleh karena itulah, maka dorongan perekonomian Kota Balikpapan kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan langkah-langkah yang serius untuk mentransformasi perekonomian Kota Balikpapan yakni selain menjadi Kota Industri Migas, Kota Balikpapan juga harus dikembangkan menjadi Kota industry, pusat perdagangan dan jasa. Kebijakan transformasi ekonomi tersebut akan membawa Kota Balikpapan menjadi kota yang selama ini dipengaruhi industri migas, menjadi kota yang berbasis industri, perdagangan dan jasa trade inilah tantangan pembangunan Kota Balikpapan saat ini hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

18. Keuangan Daerah

Seperti halnya daerah lain di Kalimantan Timur, penerimaan daerah di Kota Balikpapan didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk manandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tahun 2011, dana perimbangan memberikan kontribusi 64,41 %. Dalam periode yang sama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan cerminan

kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dana yang berasal dari daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 12,35 %. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kota Balikpapan.

Keuangan daerah Kota Balikpapan 20 (dua puluh) tahun kedepan merupakan sebuah tantangan untuk menggali sumber-sumber keuangan baru. Kondisi tersebut memberikan tantangan bagi Kota Balikpapan untuk dapat menggali berbagai potensi daerah yang dimiliki seoptimal mungkin untuk mencapai kemandirian keuangan daerah sebagai salah satu ciri daerah otonom. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana secara terintegrasi dan meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi dan produksi serta peningkatan tingkat pendidikan dan keahlian sumber daya manusia. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah Kota Balikpapan diharapkan pendapatan asli daerah Kota Balikpapan turut meningkat pula.

19. Pertanian

Potensi pertanian tanaman pangan di Kota Balikpapan tidaklah terlalu menonjol mengingat bahwa Kota Balikpapan adalah daerah perkotaan. Sebagian besar bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat Kota Balikpapan selama ini mengandalkan suplai dari daerah lain. Hal ini dapat dilihat dari peranan sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah hanya rata-rata mencapai 0,1% (dengan migas) dan 1 % (tanpa migas).

Hasil kegiatan pertanian tanaman pangan di Kota Balikpapan berupa padi dan palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis buah-buahan yang

dihasilkan antara lain : salak dan pepaya Jenis padi dan buah-buahan cenderung mengalami penurunan karena lahannya semakin banyak dikonversi menjadi lahan pemukiman. Jenis palawija dan sayur-sayuran cenderung stabil karena petani menggarap yang umumnya melakukan pinjam pakai terhadap pemilik lahan tidur.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, sebagian besar lahan pertanian dikonversi menjadi lahan pemukiman dan fasilitas umum. Akibatnya petani harus berpindah-pindah mencari lokasi baru yang bisa dimanfaatkan. Selain keterbatasan lahan, permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan usaha pertanian di Kota Balikpapan adalah :

1. Petani di Kota Balikpapan sebagian besar adalah memanfaatkan lahan yang bukan lahan miliknya, sewa dan pinjam
2. Petani umumnya memiliki tingkat pendidikan, kemampuan dan ketrampilan yang rendah sehingga sulit menerapkan teknologi-teknologi baru yang memerlukan ketrampilan dan penalaran yang memadai.
3. Mahal mekanisasi pertanian
4. Sumber permodalan yang terbatas sehingga praktek sistem ijon terjadi di tingkat petani.

20. Kelautan dan Perikanan

Mengingat wilayah perairan Kota Balikpapan yang luas yang merupakan potensi sudah sepentasnya jika penggalian potensi kelautan lebih ditingkatkan tanpa merusak/mengganggu ekosistem yang ada. Kegiatan

ekspor hasil produksi perikanan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Balikpapan.

Untuk produk olahan hasil perikanan dalam bentuk ikan asin, ikan kering, olahan pangan. Jenis perikanan yang biasa di keringkan seperti terdiri dari tongkol, teri, tenggiri, kakap, dan rumput laut

Selat Makasar memiliki potensi ikan yang besar karena merupakan lalu lintas migrasi ikan. Kondisi ini dapat memberikan hasil perikanan yang lebih besar pada nelayan. Akan tetapi potensi ini belum dikelola mengingat metode penangkapan nelayan masih bersifat tradisional sehingga wilayah penangkapannya hanya disekitar perairan Kota Balikpapan. Selain jumlahnya sedikit, nilai ekonomis ikannya juga rendah sehingga pendapatannya kurang.

Budidaya perikanan Kota Balikpapan yang berjalan dengan baik adalah budidaya rumput laut. Hal ini dapat terjadi karena teknologi budidayanya sederhana, sumber bibit tersedia, pemasarannya mudah dan siklus produksinya singkat. Dengan demikian perkembangannya cukup baik dan produksinya cenderung meningkat dari tahun ketahun.

Budidaya perikanan lainnya belum berjalan dengan baik, masih banyak pembudidaya yang menggunakan cara tradisional.

Berkaitan dengan pengelolaan hasil perikanan maka instansi terkait perlu memperbanyak melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu dan diversifikasi hasil olahan perikanan. Dengan demikian, rumah tangga perikanan belum memperoleh nilai tambah terhadap produksi perikanan dan hasil olahannya.

21. Investasi Daerah

Investasi yang terdapat di Kota Balikpapan dapat dilihat dari kegiatan industrinya. Secara keseluruhan, jumlah industry di Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan yang didominasi oleh penambahan unit usaha serta investasi pada industri aneka dan industri kecil aneka formal. Industri kecil aneka non formal selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tidak menunjukkan adanya peningkatan.

Pada masa 20 (dua puluh) tahun kedepan, investasi yang masuk ke Kota Balikpapan diperkirakan akan semakin meningkat terutama pada bidang industri. Hal tersebut ditunjang antara lain (1) Kebijakan pemerintah kota untuk mengembangkan kawasan industri di Kota Balikpapan, (2) Membaiknya iklim investasi nasional dan membaiknya indikator ekonomi makro, (3) Meningkatnya akses transportasi, komunikasi dan informasi antar wilayah, (4) Terbukanya jaringan kerja sama antar daerah dan antar Negara khususnya dengan Negara tetangga yang berbatasan langsung maupun dengan Negara lain yang berminat dengan potensi daerah yang dimiliki Kota Balikpapan, (5) Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga kerja terampil dan terdidik.

22. Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Koperasi

Dalam perekonomian Kota Balikpapan sektor industri memegang peranan yang sangat penting. Kegiatan industri yang ada di Kota Balikpapan terdiri dari industri non migas yang terdiri dari industri besar/sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Kegiatan industry menengah dan besar di Kota Balikpapan merupakan supporting industry migas.

Ketergantungan industri migas sangat tinggi. Penurunan produksi migas beberapa tahun terakhir ini telah berpengaruh langsung terhadap PDRB Kota Balikpapan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan industri-industri lainnya yang mampu mengurangi ketergantungan pada industri ini.

Sementara itu, pada bidang perdagangan di Kota Balikpapan terdiri dari perdagangan kecil, menengah dan besar. Secara keseluruhan di Kota Balikpapan terdapat sarana perdagangan sebanyak 16 (enam belas) buah pasar tradisional, 7 buah mall/plaza,

Pada bidang Koperasi, secara umum koperasi di Kota Balikpapan terdiri dari berbagai jenis koperasi. Jumlah koperasi yang ada cenderung tidak bertambah. Walaupun telah berkembang secara finansial, tetapi pola manajemennya masih kurang profesional. Dalam struktur kepengurusan, masih terdapat pengurus yang belum memahami peran dan fungsinya dalam organisasi sehingga koperasi-koperasi berjalan apa adanya. Koperasi hanya dikendalikan oleh satu orang yang memungkinkan terjadinya perpecahan ketika sang pemimpin diganti.

Pada umumnya industri kecil skala rumah tangga merupakan kegiatan informal dengan tingkat produktivitas yang terbatas. Kualitas produk yang dihasilkan masih rendah menyebabkan pangsa pasar produk industri kecil menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan modal yang dimiliki, kelemahan teknologi, dan manajerial masih kurang.

Industri skala besar berupa industri migas menjadi kekuatan utama yang sangat menentukan perkembangan kegiatan ekonomi Kota Balikpapan. Industri-industri kecil belum berkembang secara maksimal. Teknologi yang

digunakan masih sederhana, pembagian kerja yang longgar dan cenderung lebih mudah untuk menyerap tenaga kerja.

23. Pariwisata

Kegiatan pariwisata di Kota Balikpapan secara umum belum berkembang. Pariwisata di Kota Balikpapan saat ini berupa wisata alam, budaya dan sejarah. Menurut rencana induk pengembangan pariwisata Kota Balikpapan terdapat 15 (lima belas) obyek pariwisata yang perlu dikaji, potensial dikembangkan, maupun sudah berkembang namun belum ditangani secara profesional.

Pada dasarnya, semua lokasi objek pariwisata ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua atau roda empat bila berlokasi didarat, dan dapat ditempuh dengan perahu motor atau speedboat untuk obyek yang berlokasi dipesisir atau di laut. Sarana penunjang berupa hotel terdiri dari hotel bintang sebanyak 16 (Enam belas) unit terdiri dari 2 bintang 5, 2 bintang empat, 8 bintang empat, 3 bintang dua, 2 bintang 1 dan non bintang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit.

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Kota Balikpapan memiliki ekosistem pesisir yang lengkap karena terdapat hamparan mangrove, padang lamun dan terumbu karang dengan segala keanekaragamannya. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar ekowisata dan penelitian.

Kawasan-kawasan tujuan wisata Kota Balikpapan umumnya belum tertata dengan baik. Sarana dan prasarana sarta kegiatan promosi wisata untuk pendukung kepariwisataan masih kurang sehingga proses

pembenahannya terkesan lamban. Selain itu beberapa kawasan tujuan wisata tersebut berada dalam lokasi perusahaan sehingga waktu dan pengunjungnya terbatas dan penataan dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan.

3.2. Isu Strategis

1. Reformasi Birokrasi

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan perlu menata kelembagaan yang diikuti dengan penempatan sumber daya manusia berdasarkan kapasitasnya dimasing-masing lembaga/instansi. Disamping itu pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan cepat bagi masyarakatnya. Hal tersebut tentunya dapat dicapai jika sumber daya manusia yang cakap, tangguh dan professional serta didukung ketersediaan teknologi informasi yang memadai.

Dalam penegakan hukum, pemerintah kota perlu mengembangkan Budaya Hukum di masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan ketaatan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara. Disamping itu Produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dijadikan sebagai landasan hukum bagi pemerintah kota untuk menangani masalah-masalah baik yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan maupun yang berhubungan dengan warga masyarakat belum

dijalankan dengan baik. Perda belum dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah kota secara maksimal dalam menata aktivitas masyarakat, sehingga timbul kekhawatiran bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersifat universal seperti pelanggaran HAM.

2. Degradasi Lingkungan Hidup Kota

Lingkungan hidup dan permukiman sehat menjadi prioritas pembangunan 2005-2025. Berbagai permasalahan lingkungan hidup yang telah disampaikan pada bab sebelumnya menjadi prioritas yang harus dituntaskan selama 20 tahun mendatang. Program konservasi hutan dan lahan yang telah berhasil akan tetap dipertahankan disamping terus mendorong dan fokus pada pelestarian serta rehabilitasi hutan dan lahan yang kondisinya masih kritis. Pengawasan dan pengendalian pencemaran akibat kegiatan usaha maupun permukiman harus ditingkatkan untuk mewujudkan clean land, clean water dan clean air. Peningkatan peran masyarakat secara luas dalam pelestarian lingkungan juga harus dikembangkan sehingga timbul kesadaran dalam masyarakat bahwa pelestarian dan pengelolaan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.

Program pengembangan dan pembangunan sanitasi telah direncanakan untuk lima tahun mendatang melalui Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang merupakan sinergitas peran berbagai pemangku kepentingan sehingga terwujud sanitasi sehat Kota Balikpapan.

3. Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur serta Penataan Kota

Infrastruktur perkotaan merupakan fasilitas fisik yang harus disediakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga berperan sangat penting dalam pembangunan. Pembangunan infrastruktur perkotaan tersebut telah dapat dirasakan oleh masyarakat, namun patut diakui belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Sektor infrastruktur terdiri atas prasarana transportasi, sumber daya air, dan prasarana permukiman yang berperan sebagai pembentuk struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, serta pengikat antar wilayah. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur harus terus dilakukan dalam mendukung perekonomian.

Dibidang prasarana transportasi hingga tahun 2010 adalah Jalan Nasional dalam kondisi rusak 15,09% dari 115 Km, Jalan Propinsi dalam kondisi rusak 33,77% dari 221,07 Km, dan Jalan Kota dalam kondisi rusak 34,09% dari 463,35 Km. Kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh kapasitas drainase jalan yang mengalami penurunan standar teknis, pengembangan permukiman yang cukup tinggi sehingga membuka jaringan jalan baru yang belum permanen, kondisi indiscipliner dari para supir yang memuat kendaraan yang melebihi tonase jalan yang ditetapkan, namun lebih diutamakan oleh faktor daya dukung tanah (lempung, podsolik merah kuning) yang kurang memenuhi persyaratan teknis jalan sementara secara teknis minimal daya dukung tanah minimal (angka CBR) 6%. Disamping itu belum terealisasinya SAUM sebagai wujud penyelenggaraan transportasi menghubungkan antar moda transportasi.

Dibidang sumberdaya air, ketersediaan air baku Kota Balikpapan saat ini hanya 1.104 liter/detik sedangkan kebutuhan air baku mencapai 1.206 liter/detik sehingga terjadi defisit air baku sebesar 102 liter/detik. Rencana

pembangunan Waduk Teritip dan Wain masih terkendala oleh pembebasan lahan yang berdampak pada lambatnya proses sertifikasi bendungan sehingga menghambat pelaksanaan fisik pembangunan bendungan itu sendiri. Penggunaan air bawah tanah harus sudah mulai dibatasi mengingat kondisi hidrologi Kota Balikpapan sangat terbatas. Target Kota Balikpapan sampai tahun 2016 adalah tersedianya air baku mencapai 1.400 lt/detik.

Dibidang pra sarana permukiman, tingginya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal mengakibatkan tak terkendalinya konversi lahan yang mengakibatkan munculnya potensi lingkungan kumuh dan masih tingginya angka *backlog* serta masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendahbanjir.

Disamping itu pemenuhan layanan air bersih, sanitasi (air limbah, sampah, dan drainase) terutama masyarakat berpenghasilan rendah masih dirasakan minim. Cakupan layanan air bersih perpipaan mencapai 73 % terkendala karena terbatasnya kapasitas air baku. Cakupan layanan air limbah perpipaan hanya 2 %, sedangkan 98% air limbah masih dibuang ke tanah atau badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Cakupan layanan persampahan sudah mencapai 80 % dengan timbulan sampah 290 ton/hari, namun pengelolaan sampah berbasis masyarakat (3R) masih rendah. Sedangkan drainase masih kurang berfungsi optimal karena masih tingginya sedimentasi dan ditemukannya sampah, terutama pada drainase lingkungan permukiman, yang menimbulkan banjir pada 12 lokasi dengan ketinggian genangan > 30 cm yang memerlukan penanganan hingga tahun 2011,

meskipun telah mengalami penurunan dari 87 lokasi genangan air pada tahun 2004/2005.

Semua hal tersebut diatas merupakan tantangan dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Balikpapan guna mewujudkan pembangunan yang selaras dengan rencana tata ruang. Saat ini Kota Balikpapan telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2005 – 2015 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006. Kebijakan penataan ruang yang dituangkan dalam RTRW Kota Balikpapan adalah kebijakan penggunaan lahan 52% luas wilayah sebagai kawasan non budidaya dan 48% luas wilayah kota sebagai kawasan budidaya. Sedangkan pada RTRW Tahun 2012 – 2032 yang hingga saat ini sedang dalam tahap pengesahan Raperda-nya, terdapat kebijakan penataan ruang tambahan dalam penataan ruang Kota Balikpapan yaitu *Foresting The City* dan *Green Coridor*. Oleh karena itu, pembangunan bukan hanya diarahkan untuk sesuai dengan peruntukan lahan dalam RTRW Kota Balikpapan, juga diarahkan untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang tersebut di atas.

4. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan tidak bermaksud mempertentangkan ekonomi besar dengan ekonomi kecil. Persoalan ekonomi kerakyatan bukan mempertentangkan antara *wong cilik* dengan *wong gedhe*. Ekonomi kerakyatan bukan bagaimana usaha kecil, menengah, dan usaha mikro dilindungi. Ekonomi kerakyatan bukan ekonomi belas kasihan, bukan ekonomi penyantunan kepada kelompok masyarakat yang kalah dalam persaingan. Tetapi ekonomi kerakyatan adalah tatanan ekonomi dimana aset

ekonomi dalam perekonomian nasional didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara. Secara definisi ekonomi kerakyatan adalah:

- (1) Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan pertumbuhan *output* perekonomian suatu negara secara mantap dan berkesinambungan, dan dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat.
- (2) Tata ekonomi yang dapat menjamin pertumbuhan *output* secara mantap atau tinggi adalah tata ekonomi yang sumber daya ekonominya digunakan untuk memproduksi jasa dan barang pada tingkat pareto optimum. Tingkat pareto adalah tingkat penggunaan faktor-faktor produksi secara maksimal optimum dan tidak ada faktor produksi yang menganggur atau *idle*.
- (3) Tata ekonomi yang dapat menjamin *pareto optimum* adalah tata ekonomi yang mampu menciptakan penggunaan tenaga kerja secara penuh (*full employment*) dan mampu menggunakan kapital atau modal secara penuh.
- (4) Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat adalah tata ekonomi yang pemilikan aset ekonomi nasional terdistribusi secara baik kepada seluruh rakyat, sehingga sumber penerimaan (*income*) rakyat tidak hanya dari penerimaan upah tenaga kerja, tetapi juga dari sewa modal dan deviden. Secara ekonomis, dalam perekonomian kerakyatan, model income masyarakat adalah sebagai berikut: $Y_i = (W + \pi + is)_i$. Dimana Y_i adalah income individu anggota masyarakat, W adalah penerimaan dari upah tenaga kerja, π adalah penerimaan dari *deviden* atau bagi hasil sisa usaha, i adalah tingkat sewa modal (misalnya bunga deposito), dan s adalah jumlah tabungan

atau *endowment* yang disewakan. Dengan demikian dalam tata ekonomi kerakyatan, masyarakat bukan hanya sebagai buruh dalam perekonomian tetapi juga pemilik atau memiliki saham di sektor produksi.

Tujuan utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka isu strategis ekonomi kerakyatan di Kota Balikpapan dalam garis besarnya meliputi empat hal berikut:

1. Kurang tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga masyarakat.
2. Belum maksimalnya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terantar.
3. Belum optimalnya distribusi kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
4. Belum maksimalnya jaminan kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

5. SUMBER DAYA KELAUTAN

Kota Balikpapan memiliki potensi perikanan tangkap seluas 337.805 KM2 yang membentang disepanjang selat makassar dan laut sulawesi, sedangkan potensi perikanan budidaya Tambak seluas +- 905 Ha, yang tersebar di dua kecamatan yaitu Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat.

Produksi Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan secara total masih

didominasi oleh sektor perikanan tangkap yaitu sebesar 95,3% sedangkan sisanya berasal dari sektor perikanan Budidaya yaitu sebesar 4,5%.

Isu-isu strategis pada sektor kelautan dan perikanan tahun 2005-2025, antara lain:

1. Kurangnya Kapasitas SDM Nelayan dan pembudidaya (Keterampilan, Penguasaan Teknologi, Pola Pikir dan Lain-lain) membatasi optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan.
2. Kemiskinan dan kesejahteraan nelayan.
3. Terbatasnya fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan.
4. Terbatasnya armada penangkap ikan baik jumlah maupun kapasitas.
5. Tidak adanya sistem monitoring pendaratan hasil penangkapan ikan dan stok sumber daya ikan.
6. Kebutuhan konsumsi ikan cenderung meningkat.
7. Konflik penggunaan ruang antar sektor perikanan, pariwisata dan perhubungan.
8. Belum tersedianya data akurat mengenai potensi budidaya perikanan.
9. Belum optimalnya pemanfaatan ruang dan pulau-pulau kecil sebagai lokasi budidaya laut.
10. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan budidaya.
11. Kualitas produk perikanan masih rendah.

6. Sumber Daya Manusia

Dari permasalahan yang dipaparkan di atas, terdapat isu strategis dalam pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi bidang

Pendidikan yaitu ketersediaan fasilitas pendidikan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan perlu mendapatkan perhatian utama. Sebagai kota jasa, industri dan perdagangan, Kota Balikpapan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Namun hal tersebut belum bisa terpenuhi karena sebagian tenaga kerjanya belum memiliki tingkat pendidikan yang memadai atau keahliannya tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Pemerintah Kota Balikpapan perlu mengembangkan pendidikan unggulan dan kejuruan baik secara formal, non formal maupun informal.

Bidang kesehatan, yang perlu diperhatikan adalah Jenis penyakit yang masih sering dialami oleh masyarakat diantaranya adalah disentri, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan gangguan saluran pernafasan. Penyebab utamanya adalah masih kurangnya ketersediaan sanitasi yang baik, serta kebersihan lingkungan dan polusi udara. Seiring dengan penambahan penduduk yang pesat maka diperlukan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Serta tersedianya jaminan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada semua lapisan masyarakat melalui pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan.

Bidang Kependudukan, bahwa penambahan penduduk Kota Balikpapan pertahun cukup tinggi, yakni rata-rata mencapai 4,13 % per tahun. Pertambahan tersebut umumnya didominasi oleh penduduk usia produktif yang disebabkan oleh migrasi. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi Kota Balikpapan sebagai kota jasa, industri dan perdagangan yang menjadi daya tarik masyarakat Indonesia untuk mendapatkan peluang kerja di Kota Balikpapan. Disamping itu penyebaran penduduk Kota Balikpapan juga tidak

merata. Hal ini mengakibatkan munculnya pemukiman – pemukiman kumuh dengan permasalahan sosial yang cukup tinggi.

Bidang Ketenagakerjaan, bahwa kebutuhan tenaga kerja di Kota Balikpapan masih cukup besar mengingat Kota Balikpapan merupakan kota industri, perdagangan dan jasa yang terus berkembang. Sektor perindustrian Kota Balikpapan diprediksi tumbuh positif yang dibarengi dengan kebutuhan tenaga kerja yang profesional. Perkembangan industri tersebut dapat terlihat dari komitmen Pemerintah Kota untuk mengembangkan Kawasan Industri Kariangau.

Untuk itu memperbaiki mutu dan kualitas tenaga kerja Kota Balikpapan melalui pelatihan dan praktek kerja agar menjadi tenaga yang siap pakai. Disamping itu kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja perlu mendapat perhatian secara serius. Diperlukan upaya – upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar merasa aman bekerja.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa peran aktif perempuan dalam pembangunan dinilai masih kurang. Pekerja sektor formal umumnya didominasi oleh kaum laki-laki sehingga peluang bagi perempuan untuk berkarier masih rendah. Ditinjau dari disparitas pendapatan sektor non pertanian, penghasilan perempuan dan laki-laki di Kota Balikpapan. Masih banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Bidang Pemuda dan Olah Raga, bahwa peran dan fungsi pemuda dalam pembangunan di Kota Balikpapan umumnya masih rendah. Kegiatan dan organisasi kepemudaan belum mampu menunjukkan fungsi dan peran lembaga kepemudaan dalam proses pembangunan. Mengingat peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan pada masa

yang akan datang diprediksi akan meningkat maka diperlukan upaya-upaya untuk mendorong kepedulian terhadap berbagai permasalahan pembangunan. Dalam hal prestasi olahraga masyarakat Balikpapan cukup baik. Tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan olahraga perlu didukung oleh sarana dan prasarana olahraga yang tersedia. Masih minimnya sarana dan prasarana olah raga menyebabkan atlit-atlit muda berbakat tidak memiliki tempat latihan yang memadai dan latihan-latihan yang dilakukan menjadi kurang intensif. Dengan demikian, atlit-atlit yang ada belum maksimal menunjukkan prestasinya baik di tingkat provinsi ataupun nasional.

Permasalahan Kemiskinan, masih akan terjadi di Kota Balikpapan. Hal ini dikarenakan penduduk miskin Kota Balikpapan sebagian besar merupakan pendatang baru tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang memadai. Kaum pendatang baru tersebut berada di Balikpapan tanpa pekerjaan yang jelas sehingga menambah penduduk miskin. Disamping itu pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat dan penduduk lanjut usia perlu mendapatkan perhatian.